



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2019/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : CALON WAKIL DIREKTUR
SUB UNIT KERJA : CALON WAKIL DIREKTUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARMAILIS
2. Jabatan : CALON WAKIL DIREKTUR
3. NHK : 659629

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.467.900.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/130 m2 di LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 311.000.000
2. Tanah Seluas 345 m2 di LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 480 m2 di LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/120 m2 di KOTA PADANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 900.000.000
5. Tanah Seluas 473 m2 di KOTA PADANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 141.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 438.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1,5 E M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH 1,5 S M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOPY SPD MOTOR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 46.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	506.586.644
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.458.486.644
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.458.486.644

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **10 September 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.